



## **Tradisi Bakar Batu pada Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo dalam Perspektif Kebijakan Publik**

**Orce Kabunggul<sup>1\*</sup>**

*<sup>1</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teknologi Surabaya, Jl. Balongsari Praja V No.1, Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60188*

### ARTICLE INFO

---

*Article history:*

Received 23/01/2025

Revised 19/03/2025

Accepted 31/03/2025

---

### **Abstract**

*Local traditions are often not an integral part of public policy, including in Yahukimo Regency, Highland Papua. One important tradition still practiced by the Mek Tribe is Bakar Batu, a cultural practice with social, economic, and ecological value. This study aims to analyze the role of the Bakar Batu tradition from a public policy perspective and its potential as a supporting element for sustainable development. The method used was descriptive qualitative with participatory observation, in-depth interviews, and document study. Data were obtained from traditional leaders, the community, and government officials, then analyzed using a successive approximation approach. The findings indicate that Bakar Batu plays a role in cultural preservation, conflict resolution, strengthening social cohesion, natural resource management, and improving the local economy. However, government policy support is still limited, particularly in aspects of funding, integration of cultural values in education, and legal protection of customary land. This tradition also has great potential in supporting environmental conservation and the development of cultural tourism based on the creative economy. Therefore, responsive, inclusive, and collaborative public policies are needed between the government, indigenous communities, and stakeholders so that the Bakar Batu tradition can contribute significantly to sustainable development in Highland Papua.*

**Keywords:** *Stone Burning, Public Policy, Local Culture, Papua Mountains*

### **Abstrak**

Tradisi lokal sering kali belum menjadi bagian integral dalam kebijakan publik, termasuk di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu tradisi penting yang masih dijalankan oleh komunitas Suku Mek adalah Bakar Batu, sebuah praktik budaya yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tradisi Bakar Batu dalam perspektif kebijakan publik dan potensinya sebagai elemen pendukung pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Data diperoleh dari tokoh adat, masyarakat, dan pejabat pemerintah, lalu dianalisis menggunakan pendekatan successive approximation. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bakar Batu berperan dalam pelestarian budaya, resolusi konflik, penguatan kohesi sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, dukungan kebijakan pemerintah masih terbatas, terutama dalam aspek pendanaan, integrasi nilai budaya dalam pendidikan, dan perlindungan hukum atas lahan adat. Tradisi ini juga memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya berbasis ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan kolaboratif antara



pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan agar tradisi Bakar Batu dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua Pegunungan.

**Kata Kunci:** Bakar Batu, Kebijakan Publik, Budaya Lokal, Papua Pegunungan

\*Penulis Korespondensi

E-mail : ocekabunggul@gmail.com

## PENDAHULUAN

Secara geografis terletak di titik paling timur Indonesia, Papua merupakan daerah yang kaya akan seni tradisional dan berbagai tradisi budaya selain sumber daya alam yang melimpah. Setiap suku bangsa di daerah yang dulunya dikenal sebagai Irian Jaya ini memiliki seni tradisional yang unik. Masyarakat Pegunungan Papua, termasuk suku Dani, Lani, dan Yali, memiliki adat membakar batu sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih, menyambut tamu, menyelesaikan pertikaian, dan bahkan berduka atas kejadian di masa lalu. Ini adalah upacara komunal sakral di mana daging dan umbi-umbian dimasak bersama di atas batu yang membara.

Untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya dan kesenian tradisional lainnya tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, otonomi khusus Provinsi Papua diatur dalam Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Papua agar setara dengan daerah lain (Wulandari, 2024).

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan sendiri, termasuk perencanaan, pembiayaan, pemerintahan, dan pembentukan wilayah, kecuali untuk urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat (Peraturan.bpk.go.id, 2025).

Dari sudut pandang kebijakan publik, adat istiadat masyarakat Pegunungan Papua yang membakar batu memiliki sejumlah konsekuensi yang signifikan. Sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih, membina masyarakat, dan menyelesaikan konflik, adat istiadat ini yang melibatkan kegiatan memasak bersama memiliki makna yang sangat dalam. Pemanfaatan adat istiadat untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya semuanya harus diperhitungkan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan adat istiadat ini.

Menurut Dunn (2003) dalam (Indah Prabawati, 2020), Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dikenal sebagai kebijakan publik. Di Indonesia, pelestarian budaya dilakukan dengan menjaga bahasa, adat, seni, dan kepercayaan lokal. Teori sinkronisasi budaya mendukung penyelarasan nilai-nilai lokal dengan pembangunan nasional (Samongilailai, 2024).

Tradisi Bakar Batu di Pegunungan Papua berperan penting dalam kebijakan publik sebagai sarana pelestarian budaya, penyelesaian konflik, dan penguatan identitas lokal, serta memiliki nilai simbolik dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. (Nipur, 2022). Sebagai bagian dari budaya lokal, Bakar Batu mencerminkan norma, kebiasaan, dan keyakinan masyarakat Papua yang diwariskan secara turun-temurun (Robaka, 2024). Oleh karena

itu, kebijakan publik perlu memberi perhatian pada pelestarian tradisi ini melalui dukungan nyata dalam bentuk regulasi, promosi budaya, dan fasilitasi kegiatan adat agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Para ahli memiliki pandangan beragam tentang budaya lokal, E.B. Tylor mendefinisikan budaya sebagai sistem kompleks berupa pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, dan perilaku yang dipelajari seseorang sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, Koentjaraningrat menyebut budaya sebagai sistem pikiran, emosi, dan perilaku yang diperoleh dan diciptakan manusia dalam kehidupan sosial. (Firosya, 2023).

Menurut penelitian (Kasenda, 2024), Tradisi Bakar Batu di Pegunungan Papua tak hanya berfungsi sebagai cara memasak, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial. Dilaksanakan secara kolektif, tradisi ini memperkuat solidaritas, identitas budaya, serta berperan dalam penyelesaian konflik, pembangunan sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, melalui kebijakan yang relevan, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan warisan budaya seperti tradisi Bakar Batu. Salah satu fungsi penting dari tradisi ini adalah sebagai sarana penyelesaian konflik secara adat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan antar pihak yang bertikai (Harefa, 2024). Maka dari itu, kebijakan publik yang mengakui peran tradisi dalam resolusi konflik dapat memperkuat stabilitas sosial di tingkat lokal.

Tradisi Bakar Batu memiliki nilai penting dalam memperkuat keharmonisan sosial dan pembangunan masyarakat di Pegunungan Papua. Ritual ini menjadi momen kebersamaan yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana syukur dan solidaritas. Contohnya, pelaksanaan Bakar Batu oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan sebagai bentuk syukuran pelantikan sekaligus ajakan membangun daerah bersama (Boga, 2025). Bakar Batu membentuk ruang solidaritas kolektif atau *civil sphere*. Emile Durkheim melihat tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang menyatukan masyarakat (Safitri, 2023). Selain itu, George Herbert Mead menekankan bahwa interaksi sosial menciptakan makna melalui konsep pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) (Yasa, 2022). Tradisi ini menjadi media aktualisasi diri dan komunikasi sosial yang mendalam. Penulis menyimpulkan bahwa nilai sosial dalam Bakar Batu bukan hanya warisan budaya, tetapi juga kekuatan komunitas dalam membangun interaksi yang positif, memperlancar hubungan sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis nilai lokal.

Tradisi Bakar Batu di Papua Pegunungan tidak hanya memiliki nilai budaya dan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Bakar Batu dapat dikembangkan sebagai objek wisata budaya unggulan. Melalui promosi yang efektif dan pelatihan bagi masyarakat, acara ini mampu menarik wisatawan serta membuka peluang ekonomi, seperti penjualan kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan layanan wisata berbasis komunitas.

Pemberdayaan UMKM lokal dan pembangunan infrastruktur wisata yang ramah budaya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bakar Batu juga mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Tradisi Bakar Batu masuk dalam kategori cultural dan social attraction, karena menampilkan ritual unik yang sarat makna spiritual dan nilai sosial tinggi. Jika dikembangkan secara kolaboratif oleh pemerintah dan masyarakat, Bakar Batu berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif lokal sekaligus memperkuat identitas budaya Papua Pegunungan dalam kancah nasional maupun internasional.

Tradisi Bakar Batu memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi kreatif di Papua Pegunungan melalui kuliner, kerajinan, dan wisata budaya. Dukungan budaya lokal, pelaku seni, dan perhatian pemerintah menjadi modal penting. Contoh sukses seperti noken, lukisan tusuk pinang, dan papeda menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan promosi, pembinaan, dan penguatan identitas budaya, Bakar Batu dapat menjadi sumber inovasi sekaligus pelestarian budaya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Observasi dan wawancara dilakukan kepada tokoh adat, masyarakat, dan pejabat, termasuk Ketua Komisi A DPRD Yahukimo. Studi dokumen menelaah respons kebijakan pemerintah terhadap pelestarian budaya. Metode ini mengikuti prinsip Sugiyono (2014)

bahwa peneliti adalah instrumen kunci (Ali, 2022), dan data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder (Syaifuddin, 2022). Analisis menggunakan pendekatan successive approximation Neuman, 2014; (Af Sigit Rochadi, 2022) dengan triangulasi teknik dan sumber untuk validitas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tradisi Bakar Batu Pada masyarakat Papua Pegunungan**

Tradisi Bakar Batu di Papua adalah simbol kebersamaan dan kesakralan, selalu hadir dalam momen penting seperti perdamaian adat, pernikahan, hari raya Kristen, serta upacara adat lainnya seperti kelahiran, kematian, dan panen (Nipur, 2022). Lalu Menurut Nawari Ismail (2011) dalam tulisan (Robaka, 2024), Kebudayaan lokal mencakup keyakinan, kebiasaan, dan karya manusia yang berkembang menjadi norma kolektif dan mencerminkan ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Okto Kambue, Ketua Komisi A DPRD Yahukimo, "*Bakar Batu merupakan tradisi terpenting yang mempertemukan warga dalam semangat kebersamaan*". Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini bukan sekadar kuliner, tetapi simbol persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur, sekaligus sarana pelestarian budaya dan identitas masyarakat adat.

**Gambar 1. Tahapan Bakar Batu meliputi persiapan, memasak, doa 3 hari meninggalnya Nias Pusop suami tercinta (7 Februari 2025, pukul 10.04 WIT), dan makan bersama sebagai wujud penghormatan dan kebersamaan**



Sumber dari: Dokumentasi sendiri oleh peneliti pada saat proses bakar batu, 7 Februari 2025, jam 11.46 WIT.

Dari gambar 1.1 di atas Berdasarkan observasi aktif, saya turut serta dalam tradisi Bakar Batu di Papua Pegunungan. Saya dilibatkan dalam seluruh proses, mulai dari mengumpulkan kayu, memanaskan batu, hingga menata makanan seperti ubi dan daging di dalam lubang. Selama menunggu, masyarakat berbagi cerita tentang makna tradisi ini. Setelah matang, makanan dibuka dan dinikmati bersama. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam karena mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur.

### **Kontribusi Konsep Kebijakan Publik dalam Budaya Bakar Batu**

Dukungan finansial dari pemerintah sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal seperti tradisi Bakar Batu. Bantuan dana dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara adat, pelatihan generasi muda, serta promosi budaya melalui festival dan media. Dengan adanya pembiayaan yang berkelanjutan, masyarakat memiliki sumber daya untuk terus melestarikan nilai-nilai leluhur. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada budaya lokal akan memperkuat identitas bangsa dan menjaga warisan

budaya di tengah perkembangan zaman.

(Kirana, 2024) membahas peran pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional melalui kebijakan, dukungan finansial, dan program berbasis masyarakat. Ditekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor kebudayaan guna memperkuat identitas budaya dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda GAMKI, Saudara Wanus Tibul (13 Juni 2025) di Kabupaten Yahukimo *"Tradisi Bakar Batu masih lestari dan bernilai budaya, sosial, serta ekonomi. Namun, dukungan pemerintah masih minim dan bersifat simbolis. Masyarakat menanggung kebutuhan tradisi ini secara swadaya melalui gotong royong."* Oleh karena itu, diharapkan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk dukungan anggaran, pembinaan budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pelestarian tradisi.

Pendidikan berkembang melalui interaksi yang mendukung antara guru dan peserta didik. Pembelajaran akan efektif jika mampu memaksimalkan potensi siswa dengan pendekatan yang bermakna. (Irman, 2023) menegaskan hal ini lewat pengembangan bahan ajar IPA kelas V SD yang mengintegrasikan tradisi Bakar Batu dalam materi perpindahan kalor, yang terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sekaligus mengenalkan nilai budaya lokal.

Agar tradisi Bakar Batu tetap lestari, (Nurkotib, 2022) menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai adat, identitas, dan penyelesaian konflik. (Budiarti, 2020) juga membuktikan bahwa integrasi budaya Bakar Batu dalam

pembelajaran sains meningkatkan pemahaman siswa. Namun, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tradisi ini belum diangkat dalam muatan lokal pendidikan, padahal potensinya besar dan kabupaten masih dalam tahap pengembangan.

Penulis menyimpulkan bahwa di beberapa daerah Papua, tradisi Bakar Batu sudah diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai upaya pelestarian budaya. Namun, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, belum terdapat muatan lokal yang mengangkat tradisi ini, mengingat daerah tersebut masih tergolong baru.

Terbukti dari hasil wawancara salah satu pegawai di Dinas pendidikan Kabupaten Yahukimo oleh Ibu Martince Pusop beliau menyampaikan: *"Budaya bakar batu belum muat kurikulum di tetapkan dan belum masuk juga muatan lokal, Hanya saja budaya bakar batu jadikan jamuan dalam acara untuk menjamu tamu kenegaraan dan sudah menjadi bakar batu nasional. Karena juga Papua Pegunungan merupakan provinsi baru hasil pemekaran pada 30 Juni 2022, sehingga masih memerlukan waktu untuk menetapkan kebijakan integrasi budaya Bakar Batu dalam muatan lokal dan mata pelajaran IPA. (Hasil wawancara, tanggal 13 Juni 2025)".* Diperlukan pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan tokoh adat agar budaya Bakar Batu dapat dikenalkan lewat pendidikan. Melalui muatan lokal, siswa dapat memahami nilai tradisi secara langsung, menumbuhkan rasa bangga, dan tanggung jawab budaya. Strategi ini mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian jangka panjang.

Koentjaraningrat (2015) menyatakan bahwa pelestarian

budaya adalah sistem terpadu dengan komponen saling terkait, sehingga tidak dapat dilakukan secara individual, apalagi di tengah perubahan zaman. (Pardede, 2023). Pelestarian budaya lokal penting untuk menjaga identitas bangsa dan warisan leluhur. Tradisi Bakar Batu di Papua Pegunungan adalah warisan budaya takbenda yang perlu terus dilestarikan. Pemerintah dapat memberikan dukungan dana untuk pendidikan, peralatan, dan upacara, sementara lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan IFC turut bertanggung jawab dalam mempertimbangkan dampak proyek terhadap budaya lokal (Ramadhan, 2023).

Kabupaten Yahukimo akan menggelar Festival Budaya 12 Suku pada 12-14 Agustus 2024 di Distrik Dekai untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya. Festival ini menampilkan Bakar Batu, atraksi budaya, pameran UMKM, dan hiburan, dengan dukungan Kemendikbud, Kemendikbud, dan Pemprov Papua Pegunungan. Tujuannya memperkuat identitas budaya, pariwisata, dan ekonomi lokal

### Gambar 2. Lestarian Budaya, Pemkab Yahukimo Akan Gelar Festival Budaya 12 Suku



*Sumber gambar: berdasarkan referensi kepustakaan oleh peneliti (Yahukimo, 2024)*

Festival Budaya 12 Suku Yahukimo diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama

Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka melestarikan budaya dan mendorong wisata lokal, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

### **Pengelolaan SDA Berbasis Budaya Bakar Batu di Yahukimo dalam Kerangka Kebijakan Publik**

Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti eksploitasi berlebih, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan manfaat. Kebijakan sering menguntungkan industri besar dan mengabaikan masyarakat lokal. Diperlukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Menurut (Pasaribu, 2025) Kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia perlu menyeimbangkan eksploitasi SDA, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ekonomi hijau dan biru penting diterapkan, termasuk untuk mendukung pelestarian budaya lokal seperti tradisi Bakar Batu.

Penelitian (Bella Cinu Raya, 2024) menekankan perlunya kebijakan konservasi SDA yang kuat, dengan melibatkan masyarakat lokal dan menerapkan kearifan lokal seperti tradisi Bakar Batu sebagai strategi efektif pelestarian lingkungan. (Khairina, 2020) meneliti kebijakan ramah lingkungan di Bantul untuk mendukung SDGs. Meskipun berfokus pada Bantul, pendekatan ini relevan untuk diterapkan di Papua Pegunungan dalam pelestarian budaya dan lingkungan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Papua Pegunungan oleh Plt Timotius Matuan, S.Pd., M.Pd, *“Beliau menyampaikan bahwa saat ini belum ada kebijakan khusus terkait integrasi Bakar Batu dalam pengelolaan SDA. Namun, pemerintah sedang menyusun*

*arah kebijakan budaya dan lingkungan pasca pemekaran, serta menjajaki kerja sama lintas dinas untuk mengembangkan program muatan lokal dan edukasi budaya berbasis lingkungan. (Wawancara, 14 Juni 2025)”. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen positif pemerintah Yahukimo dalam melestarikan Bakar Batu sebagai kearifan lokal yang ramah lingkungan. Namun, belum adanya kebijakan khusus menandakan perlunya percepatan langkah konkret. Rencana kerja sama lintas dinas merupakan strategi penting agar Bakar Batu tidak hanya menjadi seremoni, tetapi terintegrasi dalam pendidikan dan konservasi lingkungan.*

Partisipasi masyarakat adat perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan berkelanjutan. Perdasus Papua No. 22 Tahun 2008 mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya alam, menjamin akses, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengelolaannya, termasuk dalam praktik tradisi seperti Bakar Batu (peraturan.bpk.go.id, 2021).

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberi kewenangan khusus kepada Pemerintah Papua untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai budaya lokal, termasuk pelestarian tradisi seperti Bakar Batu dalam artikel jurnal (Herningsih, 2022).

Meskipun belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur pengelolaan lahan untuk tradisi Bakar Batu, berbagai kebijakan seperti Perdasus dan UU Otonomi Khusus telah menyediakan kerangka hukum yang mendukung. Kebijakan ini mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, sehingga memungkinkan masyarakat di Papua Pegunungan tetap menjalankan tradisi Bakar Batu sebagai bagian dari

identitas budaya mereka dalam batas hukum yang sah.

Menurut Bapak Musa Serongon, tokoh adat Papua Pegunungan, *“Tradisi Bakar Batu adalah simbol persatuan, syukur, dan perdamaian. Dilakukan saat momen penting seperti kelahiran, kematian, atau perdamaian, tradisi ini melibatkan kerja sama seluruh komunitas. Lokasinya berada di tanah adat tanpa sertifikat, tapi diakui secara turun-temurun. Ia menegaskan pentingnya perlindungan tradisi dan tanah adat oleh pemerintah”*. (Hasil wawancara, 7 Februari 2025). Tokoh adat berharap pemerintah daerah bisa mengakui tempat-tempat adat dan tidak membatasi kegiatan budaya. Ia juga berharap pemerintah tidak hanya mendukung saat upacara simbolik, tetapi juga memberi ruang legal bagi tradisi mereka.

Aktivis Yanais Yalak, Ketua Umum HPMY, menyampaikan bahwa *“Tanah adat seperti lahan untuk Bakar Batu diwariskan turun-temurun dan diakui secara adat, meskipun belum diakui secara hukum oleh negara* (Hasil wawancara, 16 Juni 2025). Beliau menekankan pentingnya pengakuan legal dan regulasi nyata, bukan sekadar simbolik, agar hak dan tradisi masyarakat adat benar-benar dilindungi.

### **Peran Bakar Batu Papua Pegunungan dalam Kebijakan Publik Sebagai Penyelesaian Konflik dan Peningkatan Pendapatan**

Tradisi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan serta memperkuat identitas kolektif.

Menurut Bapak Musa Serongon, *“Tradisi Bakar Batu sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antarindividu atau antarsuku. Prosesnya dimulai dengan mediasi oleh*

*tokoh adat, diakhiri dengan makan bersama sebagai simbol perdamaian dan larangan balas dendam.”* (Hasil wawancara, 7 Februari 2025).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Yahukimo, Okto Kambue, *“Tradisi Bakar Batu memiliki peran penting sebagai media penyelesaian konflik dan pemersatu masyarakat di Papua Pegunungan. Setelah mediasi oleh tetua adat, acara Bakar Batu digelar sebagai simbol perdamaian dan kebersamaan. Pemerintah daerah, melalui DPRD, mendukung pelestarian tradisi ini melalui program dan kebijakan budaya. Selain itu, Bakar Batu juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif. Namun, pengembangan tersebut harus berbasis komunitas dan tetap menjaga nilai sakral tradisi. Pemerintah hanya memfasilitasi, sementara masyarakat adat menjadi pelaku utama.* (Wawancara, 3 Juni 2025).

Kedua pandangan tersebut saling melengkapi dan memperkuat pemahaman bahwa tradisi Bakar Batu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai media penyelesaian konflik dan sumber peningkatan pendapatan melalui ekonomi kreatif. Dalam konteks teori resolusi konflik oleh Johan Galtung, penyelesaian sengketa berbasis budaya lokal seperti Bakar Batu mencerminkan pendekatan damai yang mengutamakan rekonsiliasi, simbol kebersamaan, dan keterlibatan seluruh komunitas sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap perdamaian (Olahkarsa, 2022). Sementara itu, menurut (Tabuni, 2023), ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi jalan alternatif bagi pembangunan ekonomi masyarakat adat. Tradisi seperti Bakar Batu memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bentuk kuliner,

kerajinan tangan, dan wisata budaya, asalkan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan tetap menghormati nilai-nilai sakralnya. Dengan demikian, pengembangan Bakar Batu harus dijalankan secara bijak, menjaga makna budayanya, dan menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama agar dapat berjalan seimbang antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Damardjati dalam (Wardani, 2024), daya tarik wisata budaya meliputi cipta, rasa, dan karsa manusia, dengan empat kelompok utama: alam, bangunan, kesenian dan tradisi, serta gaya hidup masyarakat.

Menurut Plt Kadispora Papua Pegunungan, Timotius Matuan, "*Pemanfaatan tradisi ini harus berbasis komunitas dan disetujui adat. Program desa wisata budaya dan pengembangan produk kreatif lokal didorong dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama.*" (Wawancara, 14 Juni 2025). Bapak Plt Kadis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, adat, dan pelaku pariwisata agar budaya tidak dieksploitasi. Pengembangan wisata budaya harus partisipatif, edukatif, dan berbasis kearifan lokal, dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif juga perlu diperkuat dalam program desa wisata.

Pada hasil temuan (Wenda, 2023) dalam *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* Bahwa Tradisi Bakar Batu di Papua Pegunungan bukan sekadar ritual kuliner, tetapi juga sarana mediasi, simbol perdamaian, dan penyelesaian konflik. Berbagai klan bekerja sama dalam persiapan hingga penyajian, mencerminkan persatuan meski ada perbedaan. Perempuan dan laki-laki berperan aktif, didukung pemerintah dan

gereja. Ritual ini menegaskan bahwa Bakar Batu adalah simbol kuat dalam menjaga harmoni sosial. Sejalan juga dari hasil wawancara bahwa Tradisi Bakar Batu di Papua Pegunungan berfungsi sebagai media penyelesaian konflik dan penguatan ekonomi masyarakat. Prosesi ini dilakukan setelah mediasi oleh tetua adat dan diakhiri dengan makan bersama sebagai simbol damai dan rekonsiliasi. Menurut Ketua Komisi A DPRD Yahukimo, Okto Kambue, tradisi ini mempererat solidaritas sosial melalui gotong royong. Selain itu, Bakar Batu juga berpotensi dikembangkan dalam sektor wisata dan ekonomi kreatif. Plt. Kadispora Papua Pegunungan, Timotius Matuan, menekankan pentingnya pelestarian nilai sakral tradisi, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Pemerintah tengah mendorong program desa wisata berbasis budaya dengan tetap menjaga nilai adat dan mendorong produk kreatif lokal sebagai sumber ekonomi berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi Bakar Batu memiliki peran strategis dalam pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam secara kolektif, penyelesaian konflik sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. Pesan penting dari penelitian ini adalah perlunya pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tradisi ini terbukti memperkuat solidaritas sosial dan memiliki potensi dikembangkan sebagai aset wisata budaya yang mendukung pembangunan lokal.

Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan Bakar Batu

menghadapi tantangan serius, antara lain kurangnya dukungan pemerintah, belum masuknya tradisi ini dalam sistem pendidikan formal, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap lahan adat. Meskipun ada inisiatif promosi melalui festival budaya dan kolaborasi lintas sektor, upaya tersebut masih belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan partisipatif yang berbasis budaya lokal, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Secara geografis, studi hanya mencakup wilayah terbatas sehingga belum mewakili seluruh keragaman praktik Bakar Batu di Papua. Keterbatasan waktu dan akses terhadap informan juga membatasi pendalaman data, khususnya terkait dinamika internal komunitas dan peran kelompok tertentu seperti perempuan. Selain itu, pendekatan yang bersifat potret sesaat (cross-sectional) belum mampu menangkap perubahan jangka panjang, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih luas dan longitudinal untuk memperkuat hasil temuan ini.

## REFERENSI

- Af Sigit Rochadi. (2022). *Catatan Lepas , dibuang sayang Norma Sosial dan Efektivitas Program Desa Sadar Hukum : Pelajaran Tentang Kepatuhan Hukum di Desa Abstract Program Desa Sadar Hukum ( DSH ) diluncurkan oleh Kementrian Kehakiman tahun 1980 . Program ini dimaksudkan untuk mem.* 1–12.
- Ali, M. M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/iccte-17.2017.26>
- Bella Cinu Raya, H. (2024). Penguatan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Guna Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup. [*Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*], 5(3), 381–389. <https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/95767/pdf>
- Boga, E. (2025). *Masyarakat Papua Pegunungan menggelar Pesta Rakyat Bakar Batu, Gubernur Jhon Tabo Ajak Masyarakat Bersatu Persatuan Jadi Kunci Kemajuann.* <https://www.detikpapua.com/masyarakat-papua-pegunungan-menggelar-pesta-rakyat-bakar-batu-gubernur-jhon-tabo-ajak-masyarakat-bersatu-persatuan-jadi-kunci-kemajuann/#:~:text=Selain tradisi bakar batu%2C berbagai,pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.>
- Budiarti, I. S. (2020). Effectiveness Of Generation, Evaluation, And Modification-Cooperative Learning (GEM-CL) Model Selaras Bakar Batu Cultural Practice In Papua. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 32–41. <https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.22362>
- Firosya, B. H. (2023). *Budaya Menurut Para Ahli.* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6899705/memahami-pengertian-budaya-menurut-berbagai-ahli>
- Harefa, B. (2024). *Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru.* 5(1), 837–845. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8414.837>

- 845
- Herningsih. (2022). Kebijakan Pemerintah Papua dalam Pelestarian Tradisi Bakar Batu. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 209–226. <https://doi.org/10.18326/millati.v3i1.209-225>
- Indah Prabawati, T. R. dan B. K. (2020). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April). <https://library-unesa-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/library.unesa.ac.id/download/link/ceb4c21-793d-437c-af7f-db412fdeb3a2>
- Irman, M. (2023). Pengembangan Bahan Ajar IPA Pada Materi Perpindahan Kalor Terintegrasi Kearifan Lokal Bakar Batu Papua Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V SD. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(3), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jkc.v11i3.82417>
- Kasenda, D. (2024). *Strategi Ketahanan Nasional dari Perspektif Budaya Papua: Studi Kasus Tradisi Bakar Batu pada Masyarakat Pegunungan Papua*. 4, 13749–13761. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12126>
- Khairina, E. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155. <https://doi.org/10.22146/jkn.52969>
- Kirana. (2024). *Peran Pemerintah dalam Memajukan Kebudayaan Nasional*. [https://penelitianpariwisata.id/peran-pemerintah-dalam-memajukan-kebudayaan-nasional/?utm\\_source=chatgpt.com](https://penelitianpariwisata.id/peran-pemerintah-dalam-memajukan-kebudayaan-nasional/?utm_source=chatgpt.com)
- Nipur, M. (2022). *Tradisi Ritual Bakar Batu Pada Masyarakat Suku Dani Di Distrik Kalome Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua*. 15(2), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/viewFile/41562/36954>
- Nurkotib, S. A. (2022). Makna Tradisi Bakar Batu Suku Dani (Studi Etnografi Di Kalangan Masyarakat Kampung Alang-Alang V Kabupaten Keerom Papua). *Sosial Budaya*, 19(2), 155–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.19007>
- Olahkarsa. (2022). *Mengenal Dua Teori Inti dalam Conflict Resolution*. <https://blog.olahkarsa.com/conflict-resolution-definisi-teori-dan-contohnya/>
- Pardede, M. (2023). Pengaruh Agama terhadap Pelestarian Budaya. *All Fields of Science J-LAS*, 3(2), 237–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2>
- Pasaribu, N. (2025). *Kebijakan Ekonomi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*. 5, 3895–3910. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- peraturan.bpk.go.id. (2021). *Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua*. 1–3. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/125350/perdasus-papua-no-22-tahun-2008?utm\\_source=chatgpt.com](https://peraturan.bpk.go.id/Details/125350/perdasus-papua-no-22-tahun-2008?utm_source=chatgpt.com)
- Peraturan.bpk.go.id. (2025). *Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun->



4/41054

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256-271.  
<https://doi.org/https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>